













merupakan perbuatan yang menyalahi syariat Islam, selain itu dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan disebutkan pula “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.”

Maka sudah jelas bahwa dilihat dari esensi tradisi selamatan di *Buyut Potroh* yang dilakukan oleh masyarakat Blimbing yang takut akan aspek resiko mengandung unsur kesyirikan yang dimana menurut syariat Islam dan KHI persyaratan perkawinan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan syariat Islam maka syarat tersebut tidak wajib dipenuhi dan tidak dapat disahkan sebagai syarat perkawinan.

Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang menganggap selamatan di *Buyut Potroh* adalah bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang dalam kasus ini yaitu berupa jodoh yang dituangkan dalam bentuk sedekah, maka hukum selamatan di *Buyut Potroh* adalah mubah (boleh) dikarenakan Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berbagi dengan sesama selain itu pada prinsipnya, tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti adat atau tradisi suatu kaum, Islam datang tidak untuk memberantas tradisi yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Islam datang untuk mengkolaborasikan tradisi dalam masyarakat kedalam nilai-nilai Islam. Seperti halnya tradisi selamatan di *Buyut Potroh* ini, sejauh masyarakat desa Blimbing memandang tradisi tersebut hanyalah bentuk rasa syukur kepada Allah sedangkan pohon beringin (*Buyut Potroh*) hanya dianggap sebagai

